

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN**

### **HIPOTESIS**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Sinyal (*signaling theory*)**

Teori sinyal menjelaskan bahwa pemerintah sebagai pihak yang diberi amanat oleh masyarakat berkeinginan menunjukkan sinyal yang baik kepada masyarakat (Ningsih, 2018). Tujuannya adalah agar masyarakat dapat terus mendukung kinerja pemerintah saat ini, sehingga kegiatan pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Laporan keuangan yang berkualitas, peningkatan sistem internal kontrol, pengungkapan yang lebih lengkap, penjelasan lebih detail dalam *website* dapat dijadikan sarana untuk memberikan sinyal yang baik kepada masyarakat. Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan (Li & Pustaka, 2010).

Dalam pemerintahan, teori sinyal menjelaskan bahwa posisi pemerintah sebagai pihak yang diberikan amanah dari rakyat berkeinginan menunjukkan signal kepada masyarakat. Pemerintah akan memberikan sinyal ke masyarakat dengan cara memberikan laporan keuangan yang berkualitas, peningkatan sistem internal kontrol, pengungkapan yang lebih lengkap, penjelasan lebih detail dalam *website*. Pemerintah daerah dapat juga mengemas informasi prestasi dan kinerja keuangan dengan lebih lengkap untuk menunjukkan bahwa Pemerintah daerah telah menjalankan amanat yang

diberikan oleh rakyat. (Sofyani & Dwirama, 2020)

Kerangka teori sinyal disebutkan bahwa dorongan untuk memberikan informasi adalah karena adanya informasi antara pemerintah daerah dengan pihak luar, khususnya masyarakat. Pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan dari masyarakat dengan cara mengurangi asimetri informasi yang terjadi. Salah satu cara untuk mengurangi asimetri informasi adalah dengan memberikan sinyal yang baik kepada masyarakat berupa informasi keuangan yang positif dan dapat dipercaya (Lestari & Chariri, 2012). Internet merupakan media yang paling efektif bagi pemda untuk menunjukkan sinyal positif kepada masyarakat. Pemda akan berusaha melakukan pelaporan keuangan melalui website secara lebih optimal untuk menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan amanat yang diberikan oleh rakyat (Perdana, 2018). Masyarakat dapat dengan mudah dan cepat mengakses informasi keuangan terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, sehingga dapat mengurangi asimetri informasi yang terjadi (Wijaya, 2018)

### ***2.1.2 Stewardship Theory***

Teori pertanggungjawaban *Stewardship Theory* menggambarkan bahwa motivasi manajemen lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi dan tidak ada tujuan individu (Donaldson & Davis, 1991). *Stewardship Theory* menggambarkan hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan dalam sebuah organisasi dapat dicapai dengan cara

memaksimalkan *utilitas principals* dan manajemen.

*Stewardship Theory* dapat diterapkan dalam penelitian akuntansi nonprofit seperti akuntansi pemerintahan. *Stewardship Theory* merupakan teori yang dibangun berdasarkan asumsi filosofis mengenai sifat manusia yang pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. *Stewardship Theory* manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama, steward merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena teori ini lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi. *Stewardship Theory* mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi (Wyatt, 2006). Teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi, Teori stewardship berdasarkan asumsi filosofis mengenai sifat manusia bahwa manusia dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan manusia merupakan individu yang berintegritas. Pemerintah selaku steward dengan fungsi pengelola sumber daya dan rakyat selaku principal pemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah (*steward*) dan rakyat (*principal*) berdasarkan kepercayaan, kolektif sesuai tujuan organisasi. Organisasi sektor publik memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada publik dan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat (Tasyah et al., 2017) Teori ini lebih menggambarkan situasi dimana manajemen tidak termotivasi oleh tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka dan mengasumsikan adanya hubungan yang kuat kepuasan dan kesuksesan organisasi (Davis, 1991)

### **2.1.3 Opini Audit**

“Opini audit merupakan kesimpulan kewajaran atas informasi yang telah diaudit. Dikatakan wajar dibidang auditing apabila bebas dari keraguanketraguan dan ketidakjujuran (*free from bias and dishonesty*), dan lengkap informasinya (*full disclosure*). Hal ini tentu saja masih dibatasi oleh konsep materialitas” (Halim, 2013).

“Audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”. (Agoes, 2012)

“Audit adalah suatu proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan”. (Konrath, 2002)

“Opini audit merupakan opini yang diberikan auditor tentang kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan tempat auditor melakukan audit” (Mulyadi, 2014)

Berdasarkan berbagai pengertian opini audit di atas, disimpulkan bahwa opini audit adalah hasil interpretasi auditor atas penilaian laporan keuangan suatu perusahaan dengan standar ilmu akuntansi. Hasil interpretasi tersebut selanjutnya bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pengajuan izin usaha sampai penawaran saham. (Konrath, 2002; Agoes, 2012; Halim, 2013; Mulyadi, 2014)

#### **2.1.3.1 Jenis Jenis Opini Audit**

Dalam audit keuangan, auditor memberikan pendapatnya dalam bentuk laporan audit yang mencerminkan keyakinan mereka atas kewajaran penyajian laporan keuangan entitas yang diaudit. Ada beberapa jenis opini audit yang dapat diberikan

oleh auditor menurut Standar Profesional Akuntan Publik (IAPI, 2012). Berikut adalah jenis-jenis opini audit:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Opini ini diberikan jika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan memberikan gambaran yang wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau standar akuntansi lainnya yang relevan. Ini adalah opini terbaik yang bisa diterima oleh entitas.

2. Opini Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Opini ini diberikan jika auditor menemukan adanya penyimpangan atau pembatasan ruang lingkup yang material tetapi tidak meluas, sehingga laporan keuangan secara keseluruhan masih dianggap wajar. Ada dua situasi yang dapat menyebabkan opini ini :

- a) **Ketiadaan Bukti Audit yang Memadai:** Auditor tidak mendapatkan bukti audit yang cukup mengenai beberapa aspek tertentu dari laporan keuangan.
- b) **Ketidaksesuaian dengan Standar Akuntansi:** Auditor menemukan penyimpangan dari standar akuntansi yang berlaku, tetapi penyimpangan tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan secara keseluruhan.

3. Opini Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Opini ini diberikan jika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan tidak menyajikan gambaran yang wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ini adalah opini yang paling negatif dan menunjukkan bahwa ada kesalahan atau ketidaksesuaian yang sangat material dan meluas dalam laporan keuangan.

4. Opini Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer of Opinion*)

Opini ini diberikan jika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan memadai untuk membentuk opini atas laporan keuangan, biasanya karena adanya pembatasan ruang lingkup yang sangat signifikan. Dalam situasi ini, auditor tidak menyatakan pendapat apa pun tentang kewajaran laporan keuangan.

#### **2.1.4 Ukuran Pemerintah Daerah**

“Besarnya atau kecilnya pemerintahan suatu daerah yang dapat diukur dengan total aset, jumlah pegawai, total pendapatan dan tingkat produktifitas.” (Damanpour,

1991)

“Seberapa besar pemerintahan daerah dengan jumlah aset atau pegawai atau produktifitas yang lebih besar sehingga diharapkan memiliki kinerja keuangan yang lebih baik daripada daerah yang lebih kecil.” (Patrick, 2007)

“Ukuran Pemerintah Daerah merupakan suatu skala pengukuran yang digunakan untuk menggambarkan tingkat besar kecilnya suatu daerah yang diukur dengan total aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Semakin besarnya tingkat ukuran pemerintah daerah maka dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi didaerah tersebut.” (Nova, 2020)

“Ukuran Pemerintah Daerah adalah gambaran seberapa besar/kecil skala dari pemerintah daerah yang dapat diukur dengan total aset, jumlah pegawai, total pendapatan tingkat produktifitas, sumber daya manusia, dan pengaruh pemerintah.” (Saferi, 2020)

Berdasarkan definisi - definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ukuran pemerintah daerah adalah suatu skala pengukuran yang digunakan untuk menggambarkan tingkat besar kecilnya suatu daerah yang dapat diukur dengan total aset, jumlah pegawai, total pendapatan dan tingkat produktivitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah (Damanpour, 1991; Patrick, 2007; Narulitasari & Zafira, 2021; Yustikasari, 2018)

#### **2.1.4.1 Indikator Ukuran Pemerintah**

Ukuran pemerintah daerah dapat diketahui dengan beberapa cara Ukuran satu organisasi dapat diketahui dari tingkat penjualan, jumlah pekerja, tingkat perputaran, dan total aset. Ukuran pemerintah daerah dapat diukur dengan total aset, jumlah pegawai, total pendapatan, dan tingkat produktivitas (Damanpour, 1991). Berdasarkan cara tersebut, pengukuran ukuran

pemerintah daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Total Aset

Ukuran Pemerintah Daerah = Total Aset

- b. Jumlah pegawai

Ukuran Pemerintah Daerah = Jumlah pegawai

- c. Total pendapatan

Ukuran Pemerintah Daerah = Total Pendapatan

- d. Tingkat Produktivitas

Ukuran Pemerintah Daerah = Tingkat Produktivitas

### **2.1.5 Transparansi**

“Transparansi artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya.” (Agoes, 2009)

“Merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah.” (Sabarno, 2007)

“Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.”

(Mardiasmo, 2009)

“Keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintahan dalam sumber daya yang di percayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangundangan.” (Tanjung, 2011)

Berdasarkan definisi - definisi di atas dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan. (Sabarno, 2007; Agoes, 2009; Mardiasmo, 2009; Tanjung, 2011)

#### **2.1.5.1 Pengungkapan Informasi Keuangan di *Website* Pemerintah Daerah**

Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan dan secara teknis pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi. Pengungkapan adalah penyediaan informasi dalam laporan keuangan termasuk laporan keuangan itu sendiri, catatan atas laporan keuangan dan pengungkapan tambahan yang berkaitan dengan laporan keuangan. Pengungkapan informasi keuangan di *website* merupakan pengembangan dari teori pengungkapan sukarela. Pengungkapan informasi keuangan di *website* sebagai bentuk praktek cerminan inisiatif pemerintahan untuk lebih transparan dalam pengelolaan organisasinya. Pengungkapan sukarela di *website* pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk nyata terbukanya pengelolaan kinerja dan keuangan daerah kepada



*stakeholder* khususnya masyarakat dengan cara yang mudah dan biaya yang murah. (Evan, 2003)

#### **2.1.5.2 Manfaat Pelaporan keuangan Di Internet**

Informasi laporan keuangan diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di masa mendatang. Informasi keuangan di dalam Laporan keuangan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- 1) Cakupan yang lebih luas.
- 2) Meningkatkan akuntabilitas untuk para perangkat pemerintahan daerah.
- 3) Meningkatkan transparansi dari aktivitas pemerintah.
- 4) Memfasilitasi penilaian posisi keuangan dengan menunjukkan semua sumber daya dan kewajiban.
- 5) Memberikan informasi yang lebih luas yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. (Hehanussa, 2008)

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pelaporan keuangan di internet memberikan banyak manfaat yang signifikan, mulai dari peningkatan transparansi dan akuntabilitas hingga penghematan biaya dan peningkatan kualitas informasi. Dengan memanfaatkan teknologi digital, pemerintah dan perusahaan dapat menyediakan informasi keuangan yang lebih mudah diakses, akurat, dan relevan, sehingga mendukung tata kelola yang baik dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. (Pengendalian & Akuntansi, 2010)

### **2.1.5.2 Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah**

Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) merupakan menu konten yang dipersyaratkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.52/1797/SJ Tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah, yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyiapkan dan mempublikasikan menu konten dalam situs web resmi pemerintah daerah. 12 Indikator TPAD (Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2012) :

1. Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
2. Ringkasan RKA Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
5. Peraturan Daerah tentang APBD
6. Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
7. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD
8. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD
9. Laporan Realisasi Anggaran seluruh SKPD
10. Laporan Realisasi Anggaran PPKD
11. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sudah diaudit
12. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

| No | Peneliti                                       | Judul Penelitian  | Hasil Penelitian   |
|----|--|---|--|
| 1  | (Betsy Stevanie Runtu,2023).                   | Transparansi Informasi Keuangan Pada <i>Website</i> Pemerintah Daerah.  | Berdasarkan pengujian ditemukan pula bahwa ukuran pemerintah tidak berpengaruh positif signifikan pada transparansi. Alasannya diduga kebanyakan pemerintah daerah masih abai terhadap transparansi informasi keuangan pada <i>website</i> pemerintah daerah karena kurangnya pengawasan dan pemeringkatan akan transparansi pada <i>webiste</i> pemda oleh pemerintah pusat.  |
| 2  | (Irna Amelia Moehardiono & Anik Yuliat, 2021). | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Opini Audit Terhadap <i>Internet Financial Reporting</i> Pemerintah Kota/Kabupaten Jawa Timur.   | Hasil regresi yang ditunjukkan adalah pendapatan asli daerah tidak memengaruhi secara parsial praktik <i>Internet Financial Reporting</i> Pemerintah Kota/kabupaten Provinsi Jawa Timur selama tahun 2015-2019. pendapatan asli daerah tidak berdampak secara langsung bagi masyarakat, dimana masyarakat membutuhkan informasi keuangan yang diungkapkan oleh pemda dalam <i>e-government</i> .   |
| 3. | (Melinda Monica Putri,2022).                   | Pengaruh opini audit, ukuran pemerintah daerah dan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap publikasi laporan keuangan melalui <i>website</i> (studi pada kabupaten/kota se-pulau jawa tahun 2018-2020). | 1. Opini Audit signifikan terhadap Publikasi Laporan Keuangan melalui <i>website</i> Kabupaten/Kota di Pulau Jawa pada tahun 2018-2020.<br>2. Ukuran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Publikasi Laporan Keuangan melalui <i>website</i> Kabupaten/Kota di Pulau Jawa pada tahun 2018-2020.<br>3. Tingkat Ketergantungan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Publikasi Laporan Keuangan melalui <i>website</i> Kabupaten/Kota di Pulau Jawa pada tahun 2018-2020. |

| No | Peneliti   | Judul Penelitian  | Hasil Penelitian  |
|----|--|---|---|
| 4  | (Khafid Fitriyanto Albahrudin, Hendrawan Santosa Putra, Oktaviani Ari Wardhaningrum,2023). | Analisis Transparansi Keuangan Daerah Melalui Pengungkapan Laporan Keuangan Di Internet Saat Pandemi Covid-19.      | <p>1). Tidak terdapat pengaruh antara opini audit (X1) terhadap <i>internet financial reporting</i> (Y), artinya hasil opini yang semakin baik tidak mempengaruhi pemerintah daerah untuk mengimplementasikan transparansi keuangan daerah kepada publik melalui <i>website</i> resminya.</p> <p>3). Terdapat pengaruh antara rasio independensi (X2) terhadap <i>internet financial reporting</i> (Y), artinya tingkat kemandirian yang masih rendah, maka akan mendorong pemerintah daerah untuk mengimplementasikan transparansi keuangan daerah kepada publik melalui <i>website</i> resminya.</p> <p>3). Tidak terdapat pengaruh antara ukuran pemerintah (X3) terhadap <i>internet financial reporting</i> (Y), artinya besar kecilnya pemerintah daerah yang diukur dengan jumlah asetnya tidak mempengaruhi pemerintah daerah untuk mengimplementasikan transparansi keuangan daerah kepada publik melalui <i>website</i> resminya.</p> |
| 5  | (Niken Setyo Ningrum,2023).  | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2020. | <p>1). Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini membuktikan semakin besar pemerintah daerah diukur dari aset, dengan demikian dapat mempengaruhi peningkatan transparansi pemerintah daerah jika dikelola dengan baik.</p> <p>2). Kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima pemerintah daerah</p>  |

| No | Peneliti                      | Judul Penelitian   | Hasil Penelitian   |
|----|-------------------------------|--|--|
|    |                               |  | <p>tidak bisa memberikan jaminan dalam mendorong pemerintah daerah untuk lebih transparan dalam mengungkapkan laporan keuangan kepada publik</p> <p>3). Rasio pembiayaan utang tidak berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan rasio pembiayaan utang akan berdampak buruk terhadap evaluasi kinerja dari sudut pandang masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.</p>   |
| 6  | (Aristiani, Silvia Dian 2023) | <p>Pengaruh Derajat Desentralisasi, Ukuran Pemerintah Daerah dan Opini Audit sebagai Variabel Moderasi terhadap Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten di Pulau Jawa).</p> | <p>1. Derajat desentralisasi berpengaruh positif terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan dalam <i>website</i> pemerintah kabupaten di Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa derajat desentralisasi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kelengkapan pengungkapan laporan keuangan dalam <i>website</i> pemerintah kabupaten di Pulau Jawa.</p> <p>2. Ukuran pemerintah daerah (<i>SIZE</i>) berpengaruh positif terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan dalam <i>website</i> pemerintah kabupaten di Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah yang diukur berdasarkan total aset yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah daerah merupakan faktor yang dapat memberikan pengaruh pada kelengkapan pengungkapan laporan keuangan</p> <p>3. Opini audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hubungan derajat desentralisasi dengan kelengkapan pengungkapan laporan keuangan dalam <i>website</i> pemerintah kabupaten di Pulau Jawa. Pemerintah daerah dengan</p> |

| No | Peneliti                        | Judul Penelitian  | Hasil Penelitian  |
|----|---------------------------------|---|---|
|    |                                 |   | derajat desentralisasi yang besar serta memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian tidak serta merta mengungkapkan informasi keuangan pada <i>website</i> resminya.  |
| 7  | (Attarik Yusuf Aryantama, 2023) | Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, Tindak Lanjut Rekomendasi, Komitmen Kepala Daerah, Kekayaan Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Situs Web Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2021) | <p>1. Opini audit mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan secara negatif. Penelitian ini justru menunjukkan bahwa ketika laporan keuangan daerah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, maka daerah tersebut cenderung tidak mengungkapkan laporan keuangan.</p> <p>2. Temuan audit mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan secara negatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin banyak temuan audit pada laporan keuangan akan semakin besar kemungkinan bahwa daerah tersebut tidak mengungkapkan laporan keuangan.</p> <p>3. Ukuran pemda memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan secara positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar suatu pemerintahan daerah, maka semakin besar pula kecenderungan pemerintah daerah untuk mengungkapkan laporan keuangannya</p> |

| No | Peneliti   | Judul Penelitian  | Hasil Penelitian  |
|----|--|---|---|
| 8  | Intan Indana Zulva,<br>Arik Susbiyani,<br>Diyah Probowulan | Determinan transparansi informasi keuangan Pemerintah daerah melalui <i>e-government</i> Pemerintah daerah di Jawa timur. | <p>1. Opini atas laporan keuangan suatu pemda didapat dari BPK-RI yaitu WTP (wajar tanpa pengecualian), WDP (wajar dengan pengecualian), TW (tidak wajar), TMP (tidak memberi pendapat). Opini tersebut dapat mencerminkan kondisi suatu pemda, sehingga opini baik seperti WTP dan WDP membuat suatu Pemda dapat mempublikasikannya kepada masyarakat sebagai sinyal kinerja baik dari pemerintah melalui berbagai media yang ada, salah satunya media internet yaitu <i>e-government</i> berupa <i>website</i> resmi Pemda.</p> <p>2. Kekayaan Pemda dengan melihat PAD yang tinggi suatu daerah seharusnya membuat pemda berusaha memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama transparansi anggaran suatu daerah melalui berbagai media yang ada. Salah satunya adalah media internet yaitu <i>government</i> dalam bentuk <i>website</i> resmi Pemda, sehingga dapat diakses dengan mudah dan murah</p> <p>3. Besarnya DAU yang diterima seharusnya membuat pemda lebih mempunyai kewajiban dalam mempublikasikan informasi keuangannya kepada masyarakat bahkan kepada pemerintah. Pemerintah sebagai pemberi dana tersebut juga akan mengawasi bagaimana pemda menggunakan dana tersebut, sehingga dengan adanya publikasi melalui media yang ada yaitu <i>website</i> resmi.</p> |

| No | Peneliti  | Judul Penelitian   | Hasil Penelitian  |
|----|---|--|---|
| 9  | (Sundari, 2024)   | Determinan Pengungkapan Informasi Keuangan Pada Laman Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia Yang Diperkuat Oleh Opini Audit | <p>1. Opini Audit berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan Pada Laman. Hal ini berarti bahwa opini audit yang baik mencerminkan tingginya pengungkapan informasi keuangan pada laman</p> <p>2. Rasio Kemandirian berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan Pada Laman. Artinya yaitu semakin tinggi nilai rasio kemandirian maka pengungkapan informasi keuangan semakin meningkat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara empiris.</p> |
| 10 | (Triana Saraswati, Laeli Budiarti, Yudha Aryo Sudibyo,2019) | Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Internet dan Faktor yang Memengaruhinya                                      | <p>1. realisasi belanja daerah memiliki pengaruh terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah di internet. Dengan demikian, pemerintah daerah hendaknya menggunakan belanja daerah</p> <p>2. setelah pengujian, tidak dapat membuktikan adanya pengaruh opini audit terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah di internet..</p>  |



| No | Peneliti                                   | Judul Penelitian   | Hasil Penelitian   |
|----|--|--|--|
| 11 | (Nur 'Atikah,2023).                        | <i>Analysis The Effect Of Local Government Size, Quality Of Financial Statements, And Audit Opinion On The Disclosure Of Internet Financial Reporting.</i> | <p>1). <i>The variable Size of Local Governments does not affect the Disclosure of Internet Financial Reporting in regencies or cities in the provinces of West Java and Banten in 2018-2021.</i></p> <p>2). <i>The variable Quality of Financial Statements affect the Disclosure of Internet Financial Reporting in regencies or cities in West Java and Banten provinces in 2018-2021.</i></p> <p>3). <i>The variable Audit Opinion does not affect the Disclosure of Internet Financial Reporting in regencies or cities in West Java and Banten provinces in 2018-2021.</i></p>   |
| 12 | (Devi Narulitasari ,Rosalina Zafira 2021). | <i>Determinant of Internet Financial Reporting Disclosure.</i>   | <p>1). <i>The age of this local government shows that the longer local governments exist the better they will be IFR disclosure. Long-standing regional governments have better experience and ability in reporting financial reports SAP compliant</i></p> <p>2). <i>The size of the regional government has no effect on internet financial reporting. Value government size these results show that The large size of local government is not a guarantee for the government the region publishes its financial reports through its website.</i></p> <p>3). <i>Opinion audits have no effect on internet financial reporting. Because of the significance value size of Local Government These results show that there is no the influence of WTP or non-WTP audit opinions in publishing reports finance on their website.</i></p> |

## **2.3 Kerangka Pemikiran**

### **2.3.1 Pengaruh Opini Audit terhadap Transparansi *website* Pemerintah Daerah Jawa Barat**

Bedasarkan Teori Sinyal, Opini audit diberikan oleh BPK atas penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, pemberian opini audit didasarkan pada temuan audit saat pelaksanaan audit, semakin baik opini audit yang diterima oleh Pemerintah Daerah menunjukkan kewajaran dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), semakin wajar opini audit atas LKPD menjadikan pemerintah daerah akan transparansikan kondisi tersebut agar diketahui oleh para *stakeholder* (Hardiningsih, 2020). Sebaliknya, jika terdapat temuan audit artinya terdapat masalah yang terjadi selama pelaporan keuangan pemerintah daerah yang tidak memenuhi standar akuntansi yang telah ditetapkan (Hardiningsih, 2020). Transparansi Informasi terkait opini audit pada *website* menunjukkan bahwa pemerintah daerah melaksanakan pengelolaan keuangan dengan berpedoman pada regulasi yang ada, dan akan meningkatkan rasa kepercayaan *stakeholder* pada pemerintah daerah (Rahardjo, 2020)

Dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik di bagian keuangan dibutuhkan transparansi dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. Pemerintah sebagai pihak yang diamanatkan untuk mengelola dana dari masyarakat wajib memberikan dan meningkatkan transparansi dalam pengungkapan informasi keuangan kepada masyarakat (Adiputra, 2018). Masyarakat memiliki hak dasar untuk mengetahui (*basic right to know*) dan memperoleh informasi mengenai apa yang

sedang dilakukan pemerintah, mengapa suatu program dan kebijakan dilakukan, dan bagaimana operasional pemerintah dijalankan (Fardian, 2014).

Pada kenyataannya, Pemerintah daerah yang memiliki hasil audit buruk cenderung membuat laporan keuangannya tidak tersedia untuk umum. Beberapa penelitian – penelitian sebelumnya menyatakan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan keuangan di internet, variabel opini audit memiliki pengaruh positif signifikan terhadap transparansi informasi keuangan. (Sugiyono, 2013)

Bedasarkan Penelitian Terdahulu, Opini Audit berpengaruh positif terhadap Transparansi pada *website*. Hal ini berarti bahwa opini audit yang baik mencerminkan tingginya transparansi pada *website*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara empiris opini audit dapat menjadi alat untuk memprediksi transparansi pada *website*. yang berarti sebagian besar pemerintah kabupaten di Pulau Jawa telah menyajikan informasi secara wajar sesuai dengan SAP dan SAK dalam laporan keuangan pemerintah daerah. (Sundari, 2024)

### **2.3.2 Pengaruh Ukuran Pemerintah Terhadap Transparansi *Website***

#### **Pemerintah Daerah Jawa Barat**

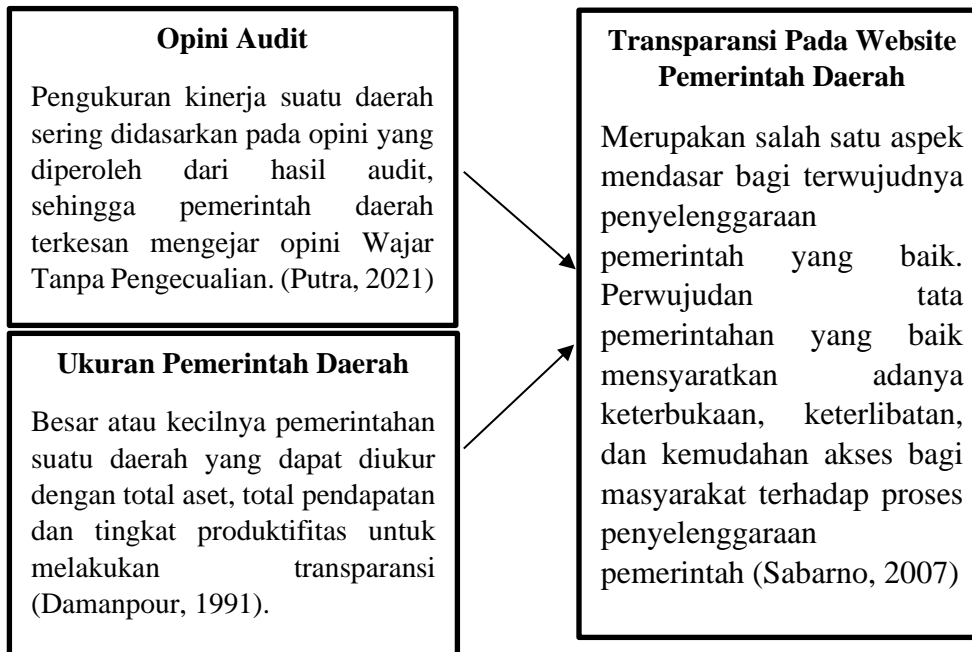
Berdasarkan dengan *Stewardship Theory*, untuk mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan masyarakat, adanya akuntabilitas dari pemerintah daerah tentu sangat diperlukan dalam membangun sistem untuk hal tersebut tidaklah menggunakan *cost* yang relatif sedikit, dengan kata lain hanya pemerintah daerah yang memiliki ukuran yang besar yang dapat menjalankan hal tersebut.

Mengingat kebutuhan untuk pengungkapan yang lebih besar oleh pemerintahan daerah yang besar, diharapkan pemerintahan daerah tersebut akan cenderung untuk mengadopsi berbagai metode pengungkapan. Internet cenderung menjadi sarana sangat efisien dan memuaskan bagi pemerintahan daerah yang cakupan otoritasnya besar (Oyelere, 2005).

Ukuran pemerintahan daerah memiliki pengaruh positif pada tingkat pengungkapan informasi keuangan dan kinerja di situs *web* Pemerintah Daerah Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, ukuran pemerintahan daerah memiliki pengaruh positif terhadap publikasi laporan keuangan Pemerintah Daerah di internet, dimana semakin tinggi total aset dari suatu pemerintahan daerah menggambarkan pula ketersediaan sumber daya daerah tersebut yang secara garis besar membuat tingkat transparansi penyajian Laporan keuangan pun semakin terbuka, maka dapat dirumuskan bahwa ukuran Pemerintahan Daerah berpengaruh positif terhadap publikasi laporan keuangan di internet. (Anisaputri, 2022)

Bedasarkan penelitian terdahulu, ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini membuktikan semakin besar pemerintah daerah diukur dari aset, dengan demikian dapat mempengaruhi peningkatan transparansi pemerintah daerah jika dikelola dengan baik (Ningrum et al., 2023)

## Kerangka Berpikir



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

### 2.3.4 Hipotesis

Hipotesis Merupakan satu kesimpulan sementara yang belum final; jawaban sementara; dugaan sementara; yang merupakan konstruk peneliti terhadap masalah penelitian, yang menyatakan hubungan antara dua atau lebih variabel karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Hartati, 2019).

H1 : Opini Audit berpengaruh positif terhadap Transparansi Informasi Keuangan pada *Website* Pemerintah Daerah.

H2 : Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Transparansi Informasi Keuangan pada *Website* Pemerintah Daerah.